BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem perekonomian yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara konseptual, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun publik untuk menambah stok modal modal fisik, yang mencakup pembelian mesin, bangunan, peralatan, serta penambahan persediaan. Mankiw (2019) menegaskan bahwa investasi merupakan bagian dari pengeluaran agregat yang paling bergejolak dan memiliki peranan penting dalam menentukan fluktuasi output jangka pendek maupun pertumbuhan jangka panjang: "*Investment is spending on the means of production new factories, new housing, and additions to inventories*". Posisi investasi dalam kerangka akuntansi pendapatan nasional dapat diuraikan melalui dua pendekatan, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka.

Dalam perekonomian tertutup, suatu negara tidak melakukan transaksi perdagangan maupun keuangan dengan negara lain, sehingga seluruh output yang diproduksi diserap oleh tiga pelaku domestik: rumah tangga, swasta, dan pemerintah. Mankiw (2019) merumuskan identitas pendapatan nasional perekonomian tertutup sebagai berikut:

$$Y = C + I + G$$

dii mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah. Dari persamaan tersebut, diturunkan konsep tabungan nasional (S) sebagai sisa pendapatan setelah dikurangi konsumsi dan pengeluaran pemerintah:

$$S = Y - C - G = I$$

Persamaan $S = I$ menunjukkan bahwa dalam perekonomian tertutup, seluruh tabungan domestik digunakan untuk membiayai investasi. Artinya, tingkat investasi sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan menabung masyarakat dan pemerintah dalam negeri, tanpa ada aliran modal dari luar (Mankiw, 2019).

Sementara itu dalam perekonomian terbuka, suatu negara berinteraksi dengan perekonomian dunia melalui perdagangan barang dan jasa serta aliran modal lintas batas. Mankiw (2019) memperluas identitas pendapatan nasional dengan menambahkan komponen ekspor neto (NX), yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor:

$$Y = C + I + G + NX$$

Di mana $NX = Ekspor - Impor$. Apabila ekspor melebihi impor ($NX > 0$), negara tersebut merupakan pengekspor modal neto, sebaliknya apabila impor melebihi ekspor ($NX < 0$), negara tersebut menjadi pengimpor modal neto. Dalam kondisi defisit neraca berjalan, kebutuhan investasi domestik dapat dipenuhi

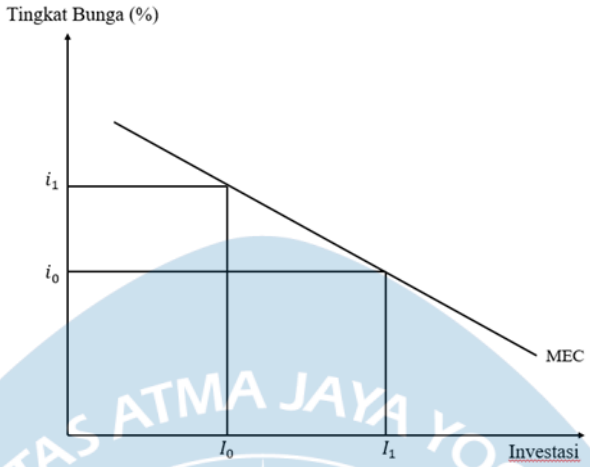
melalui aliran modal asing yang masuk, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA). Hubungan ini dirumuskan sebagai:

$$I = S + (M - X)$$

Persamaan tersebut memperlihatkan bahwa dalam perekonomian terbuka, investasi tidak lagi semata-mata bergantung pada tabungan domestik, melainkan juga dapat dibiayai oleh aliran modal asing $(M - X)$. Hal ini menjadi landasan teoritis bagi penelitian ini, di mana PMA berperan sebagai sumber pembiayaan investasi eksternal yang menutup kesenjangan antara kebutuhan investasi dan kemampuan tabungan domestik di setiap provinsi di Indonesia (Mankiw, 2019).

Lebih lanjut, hubungan antara tingkat bunga dan jumlah investasi dapat dijelaskan melalui konsep *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) atau efisiensi marjinal modal. Mankiw (2019) menyatakan bahwa investasi memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga riil: semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar biaya meminjam untuk membiayai investasi, sehingga jumlah proyek investasi yang menguntungkan semakin berkurang. Sebaliknya, penurunan tingkat bunga akan mendorong peningkatan investasi karena lebih banyak proyek yang menjadi layak secara finansial. Hubungan ini digambarkan melalui kurva MEC, sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.1. Berdasarkan kurva MEC pada Gambar 2.1, hubungan antara tingkat bunga dan investasi dapat diformulasikan dalam fungsi investasi sebagai berikut:

$$I = f(i)$$



Sumber: Sukirno, 2016

Gambar 2.1
Kurva Investasi

Berdasarkan Gambar 2.1, sumbu vertikal menunjukkan tingkat bunga (i) dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah investasi (I). Kurva MEC yang berslope negatif mencerminkan hubungan terbalik antara tingkat bunga dan investasi. Ketika tingkat bunga berada pada level i_1 (lebih tinggi), investasi yang terealisasi hanya sebesar i_0 (lebih kecil). Sebaliknya, ketika tingkat bunga turun ke level i_0, investasi meningkat menjadi I_1. Kondisi ini menggambarkan bahwa penurunan biaya modal mendorong investor termasuk investor asing untuk memperluas penanaman modalnya di suatu wilayah. Dalam konteks penelitian ini, kondisi makroekonomi provinsi yang kondusif, seperti pertumbuhan PDRB, ketersediaan infrastruktur, dan pasokan energi, secara tidak langsung berperan dalam menggeser kurva MEC ke kanan, sehingga meningkatkan volume PMA pada berbagai tingkat bunga (Mankiw, 2019).

2.1.2 Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) atau yang secara internasional dikenal sebagai *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu instrument penting dalam pembangunan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. PMA didefinisikan sebagai investasi yang dilakukan oleh subjek hukum asing, baik berupa badan usaha maupun individu, yang menanamkan modal di wilayah suatu negara lain dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMA adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, PMA memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang tidak menimbulkan kewajiban utang bagi negara penerima modal. Menurut Todaro dan Smith (2022) dalam Economic Development, investasi asing langsung membawa dampak positif berupa alih teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas jaringan pasar internasional. Argumen serupa dikemukakan oleh Arsyad (2010) yang menegaskan bahwa masuknya modal asing mampu menstimulasi efisiensi produksi domestik melalui kompetisi sehat antara perusahaan asing dan lokal.

Secara empiris, data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa pada Triwulan II 2024, realisasi PMA mencapai Rp217,3 triliun, meningkat 6,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan lima wilayah penyumbang terbesar adalah

Jawa Barat, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Maluku Utara, dan Banten. Ketimpangan distribusi PMA antarwilayah ini menjadi permasalahan mendasar yang mendorong pentingnya kajian tentang determinan PMA di 33 provinsi di Indonesia (Nurkhin *et al*., 2024).

2.1.3 Teori Lokasi dan Paradigma OLI Dunning

Salah satu kerangka teori paling komprehensif dalam menjelaskan motif dan determinan PMA adalah Paradigma OLI (*Ownership, Location, Internalization*) yang dikembangkan oleh John Dunning (1988). Keunggulan lokasi mencakup faktor-faktor seperti ukuran pasar, kualitas infrastruktur, biaya tenaga kerja, ketersediaan energi, serta kondisi kelembagaan dan kebijakan di negara penerima modal. Dalam konteks penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan infrastruktur jalan, konsumsi energi industri, IP-TIK, UMP, dan PDRB RIIL secara konseptual dapat ditempatkan dalam dimensi keunggulan lokasi dari Paradigma OLI.

Teori Lokasi juga menjelaskan bahwa investor asing cenderung memilih wilayah yang menawarkan efisiensi biaya operasional dan aksesibilitas pasar yang memadai. Menurut Krugman (1991) dalam teori *New Economic Geography*, aglomerasi ekonomi di wilayah dengan infrastruktur yang baik menciptakan daya tarik bagi investasi karena menurunkan biaya transaksi dan transportasi. Dengan demikian, kondisi infrastruktur fisik suatu provinsi menjadi sinyal penting bagi investor asing dalam menentukan lokasi investasi (Sudirman & Wafia, 2023).

2.1.4 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan komponen utama dalam sistem transportasi darat yang secara langsung mempengaruhi mobilitas faktor produksi, efisiensi distribusi barang, dan aksesibilitas antar wilayah. Dalam konteks investasi, kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dipandang sebagai prasyarat dasar bagi investor dalam mengevaluasi kelayakan suatu lokasi investasi. Pembangunan infrastruktur yang konsisiten terbukti berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas, penurunan biaya transaksi, peningkatan investasi asing, dan perbaikan akses pasar Rahayu *et al*. (2026).

Penelitian yang dilakukan oleh (Alfandi *et al*., 2024) yang berjudul "Pengaruh Infrastruktur Jalan, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (IP-TIK) Terhadap Investasi Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia" menggunakan metode *path analysis* dengan data periode 2018-2022 menemukan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi di Indonesia. Hasil ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh A W, Aimon dan Triani (2019) dalam Jurnal EcoGen yang menganalisis kausalitas antara infrastruktur transportasi, FDI, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang menemukan hubungan kausal positif antara ketersediaan infrastruktur transportasi dengan aliran masuk FDI.

Secara teoritis, hubungan positif antara infrastruktur jalan dan PMA dapat dijelaskan melalui mekanisme pengurangan biaya logistik. Jaringan jalan yang memadai memungkinkan perusahaan asing untuk mengangkut bahan baku dan mendistribusikan produk dengan biaya lebih rendah, sehingga meningkatkan

profitabilitas investasi. Posumah (2015) juga menegaskan bahwa Pembangunan infrastruktur berpengaruh positif terhadap realisasi investasi di daerah, karena infrastruktur yang baik mencerminkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas bisnis.

2.1.5 Konsumsi Energi Industri

Ketersediaan dan keandalan pasokan energi merupakan salah satu factor krusial yang dipertimbangkan oleh investor asing, khususnya dalam sektor manufaktur dan industri yang padat energi. Energi *sold by type of customers* dari sektor industri (dalam GWh) mencerminkan tingkat aktivitas industri dan kapasitas layanan energi yang tersedia bagi pelaku usaha di suatu wilayah. Semakin tinggi konsumsi energi oleh sektor industri, mengindikasikan bahwa kawasan tersebut memiliki basis industri yang lebih berkembang sehingga menjadi daya tarik bagi investor asing yang menginginkan ekosistem industrial yang matang.

Nurkhin *et al*., (2024) dalam penelitiannya pada Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol. 21 No. 2 menemukan bahwa konsumsi energi memiliki pengaruh signifikan terhadap FDI, di mana konsumsi energi tidak terbarukan menunjukkan dampak positif terhadap aliran masuk investasi asing. Temuan ini relevan mengingat sektor industri di Indonesia masih bertumpu pada energi konvensional sebagai input utama proses produksi. Studi terdahulu juga mengungkap bahwa FDI secara signifikan dipengaruhi oleh konsumsi energi tidak terbarukan, konsumsi energi terbarukan, GDP, inflasi, keterbukaan perdagangan, dan pariwisata (Azam & Haseeb, 2021, dalam Nurkhin *et al*., 2024).

Infrastruktur kelistrikan industri yang memadai juga menjadi indikator kesiapan suatu daerah dalam menampung aktivitas industri berskala besar. Studi Sumadisa *et al*. (2016) mengenai infrastruktur jalan, listrik, dan PMA di Provinsi Bali menemukan bahwa pembangunan infrastruktur listrik berpengaruh secara langsung terhadap PMA. Hal ini sejalan dengan argument bahwa investor asing pada sektor manufaktur mensyaratkan jaminan pasokan listrik yang stabil dan berkapasitas cukup sebagai prasyarat kelayakan investasi.

2.1.6 Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam era ekonomi digital semakin menempatkan infrastruktur digital sebagai determinan penting daya tarik investasi. Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik mengukur capaian Pembangunan TIK suatu provinsi berdasarkan dimensi akses, penggunaan, dan kemampuan teknologi. Semakin tinggi IP-TIK suatu provinsi, mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki ekosistem digital yang lebih maju dan kondusif bagi kegiatan usaha berbasis teknologi.

Secara teoritis, tingginya IP-TIK di suatu daerah mencerminkan kemudahan akses informasi, efisiensi komunikasi bisnis, dan dukungan ekosiistem digital yang dibutuhkan oleh investor asing dalam mengelola operasi lintas batas. Norehan *et al.,* (2022) yang mengkaji dampak FDI dan Pembangunan TIK terhadap pertumbuhan ekonomi di China dan Malaysia menemukan bahwa perkembangan TIK berkontribusi pada peningkatan daya tarik investasi asing melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan efisiensi pasar (Alifia, 2024). Dengan demikian,

daerah yang mampu meningkatkan IP-TIK secara konsisiten berpotensi menarik lebih banyak PMA, terutama dari sektor industri berbasis teknologi dan jasa digital.

2.1.7 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah terendah yang diterapkan pemerintah provinsi dan wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Dalam konteks daya tarik investasi, UMP memiliki hubungan yang ambigu: di satu sisi, upah minimum yang tinggi dapat mencerminkan tingkat produktivitas dan daya beli tenaga kerja yang baik, yang justru bisa menarik investasi yang berorientasi pada pasar domestik.

Penelitian Utma dan Rakhman (2019) yang diterbitkan dalam jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Vol. 4 No. 2 menganalisis pengaruh PDRB, UMP, dan Angkatan kerja terhadap investasi asing langsung di Indonesia tahun 2013-2016 menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan, sementara UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi UMP antar prvinsi belum menjadi pertimbangan dominan bagi investor asing di Indonesia pada periode tersebut. Namun, Choirunnisa dan Khoirudin (2024) dalam Jurnal Socius menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Jawa Tengah, sedangkan UMP tidak menunjukkan hubungan signifikan.

Dari perspektif teori neoklasik, kenaikan UMP dipandang sebagai sinyal peningkatan biaya input tenaga kerja. Khachoo dan Khan (2012, dalam Paradigma

Ekonomika, 2021) menemukan bahwa tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap arus masuk modal asing. Sementara itu, dari sudut pandang *efficiency wage theory*, upah yang lebih tinggi diharapkan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga bisa menurunkan biaya per unit output dan justru menarik investor. Dualisme argumen ini membuat hubungan UMP dan PMA bersifat kontekstual dan bergantung pada karakteristik sektor industri serta kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing provinsi.

2.1.8 PDRB Riil

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB riil) merupakan indikator agregat yang mencerminkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, yang telah disesuaikan dengan tingkat harga pada tahun dasar tertentu. PDRB riil digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah karen sudah mengeliminasi pengaruh inflasi, sehingga mencerminkan ekspansi nyata aktivitas ekonomi.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, PDRB riil dianggap sebagai proksi utama dari ukuran pasar (*market size*) suatru wilayah, yang merupakan determinan kunci PMA menurut Paradigma OLI Dunning. Semakin besar PDRB suatu provinsi, semakin menarik bagi investor asing yang mencari pasar dengan daya serap tinggi. Nurkhin *et al*., (2024) dalam Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol. 21 No. 2 secara empiris membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Pulau Jawa. Hasil ini konsisiten dengan temuan Utma dan Rakhman (2019) yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan

terhadap investasi asing langsung di Indonesia dengan nilai R^2 sebesar 0,92. Dwitayani *et al*., (2024) dalam Jurnal Proaksi Vol. 11 No. 1 yang mengkaji determinan investasi di 34 provinsi Indonesia periode 2015-2022 juga menemukan bahwa indeks pembangunan manusia berdampak positif dan signifikan pada nilai investasi, dan PDRB sebagai cerminan ukuran pasar tetap menjadi penentu utama aliran investasi ke daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai fondasi empiris yang memperkuat kerangka analisis dalam penelitian ini. Kajian terhadap berbagai studi yang relevan tidak hanya membantu memetakan perkembangan literatur tentang determinan PMA di Indonesia, tetapi juga memberikan landasan perbandingan terhadap variabel-variabel yang digunakan, yaitu infrastruktur jalan, konsumsi energi industri, Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK), Upah Minumum Provinsi (UMP), dan PDRB Riil. Berikut disajikan urutan mendalam dari lima penelitian terdahulu yang secara langsung relevan dengan topik ini.

Nurkhin *et al*. (2024) menerbitkan penelitian yang berjudul "Analisis Determinan FDI di Indonesia". Penelitian ini menggunakan data panel (*balanced panel data*) sebanyak 306 unit data dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2014-2022. Variabel dependen adalah FDI, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), Belanja Modal (BM), Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), Angkatan Kerja (AK), Ekspor, dan Impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,2399 menunjukkan bahwa sekitar 24% variasi FDI mampu dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hanya variabel PDRB Riil dan PDRB Nominal, serta Ekspor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI. Sementara variabel IPM, UMP, BM, APBD, AK, dan Impor tidak terbukti berpengaruh signifikan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa ukuran pasar yang dicerminkan oleh PDRB merupakan daya tarik utama bagi investor asing, sebagaimana daerah dengan PDRB lebih tinggi cenderung memiliki basis konsumen yang lebih besar dan kondisi bisnis yang lebih kondusif. Adapun tidak signifikannya UMP dalam model ini mengindikasikan bahwa variasi upah antarprovinsi belum menjadi pertimbangan dominan bagi keputusan investasi asing pada periode tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Utma dan Rakhman (2019) berjudul "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, dan Angkatan Kerja Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2013-2016". Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data cross section dari 33 provinsi di Indonesia dan data time series tahun 2013-2016, sehingga menghasilkan 132 unit observasi. Variabel dependen yang digunakan adalah Investasi Asing Langsung (PMA), sedangkan variabel independent terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Angkatan Kerja (AK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,92, artinya 92,21% variasi Investasi Asing Langsung mampu dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Secara parsial, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung dengan koefisien sebesar 1,78, yang berarti setiap kenaikan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan PMA sebesar 1.78%.

Temuan ini konsisten dengan teori akselerator (*accelerator principle*), yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan regional akan mendorong konsumsi, yang selanjutnya mendorong ekspansi kapasitas produksi melalui investasi. Di sisi lain, UMP berpengaruh negatif namun tidak signifikan, begitu pula Angkatan kerja yang menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan.

Sudirman dan Wafia (2023) menerbitkan penelitian berjudul "Determinan Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia Periode Tahun 2016-2020". Berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya yang menggunakan data panel, penelitian ini menggunakan data deret waktu (*time series*) periode 2016-2020. Variabel dependen adalah PMA, sedangkan variabel independen terdiri dari empat variabel: Produk Domestik Bruto (PDB), Infrastruktur (diukur melalui panjang jalan beraspal dalam km), Ekspor, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,840 dan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,807, yang berarti 80,7% variasi PMA dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Secara parsial, PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA. Infrastruktur jalan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA, yang berarti setiap peningkatan satu satuan panjang jalan beraspal akan meningkatkan PMA sebesar 0,020 satuan ceteris paribus. Temuan ini menegaskan peran infrastruktur jalan sebagai prasyarat investasi, karena infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya operasional investor dan memperlancar arus distribusi barang. Ekspor berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan IPK berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa semakin

rendahnya persepsi korupsi justru menurunkan PMA hasil yang paradoks dan mengundang perhatian pada kualitas tata kelola sebagai variabel penentu.

Alfandi dan Pancakurniasih (2024) menerbitkan penelitian berjudul "Pengaruh Infrastruktur Jalan, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (IP-TIK) Terhadap Investasi Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia". Data yang digunakan adalah data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2018-2022, menghasilkan total 170 unit observasi. Variabel dalam model terdiri dari dua variabel eksogen (Infrastruktur Jalan dan IP-TIK), variabel intervening (Investasi gabungan PMA+PMDN), variabel endogen (Penyerapan Tenaga Kerja). Metode analisis yang digunakan adalah *path analysis* (analisis jalur) dengan bantuan perangkat lunak SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Kedua, IP-TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Nilai R^2 model I sebesar 0,310 menunjukkan bahwa infrastruktur jalan dan IP-TIK secara bersama-sama menjelaskan 31% variasi investasi. Ketiga, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Nainggolan dan Yusnida (2025) menerbitkan penelitian berjudul "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 1993-2023". Penelitian ini menggunakan data sekunder deret waktu (*time series*) selama 30 tahun (1993-2023) yang bersumber dari BPS, Bank Indonesia, dan World Bank. Variabel dependen adalah FDI, sedangkan variabel independen terdiri dari tiga variabel: Upah Minimum Provinsi (UMP), Suku Bunga (SK), dan Nilai Tukar (NT). Analisis dilakukan menggunakan

regresi linear berganda (*Ordinary Least Squares*) dengan alat analisis SPSS. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,647 menunjukkan bahwa ketiga variabel Bersama-sama menjelaskan 64,7% variasi FDI. Secara parsial, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI. Temuan ini menarik karena berlawanan dengan ekspetasi teoritis dan Teori Lokasi Dunning yang memprediksi UMP tinggi mengurangi daya tarik investasi. Namun, penelitian ini menjelaskan bahwa kenaikan UMP di Indonesia berkorelasi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga investor justru melihat UMP sebagai sinyal positif terhadap kualitas tenaga kerja dan daya beli masyarakat.